Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol. 8 No. 4, Oktober 2025, hlm. 545 - 550

ISSN 2614-7912 (Print) DOI: https://doi.org/ 10.33330/jurdimas.v8i4.4023 ISSN 2622-3813 (Online)

Available online at https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurdimas

DIGITALISASI KANTOR DESA: SOLUSI CERDAS MENINGKATKAN PE-LAYANAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA SILO BONTO KABUPATEN ASAHAN

Elly Rahayu^{1*}, Herman Saputra², Adi Prijuna Lubis³, Waode Aminah Andella⁴

^{1,3}Sistem Informasi, Universitas Royal ^{2,3} Sistem Komputer, Universitas Royal email: ellyrahayu68@gmail.com

Abstract: This PkM activity aims to provide new knowledge and insights for Silo Bonto Village officials on the benefits of digitalizing the village, improving village services, and empowering the community's economy. Silo Bonto Village has a population of 6,387 people spread across 11 hamlets. The majority of the people in Silo Bonto Village, Silau Laut District, Asahan Regency, are farmers who cultivate coconut and oil palm plantations. The Silo Bonto Village Office has a village application, but it has not been utilized, the problems that arise are the absence of skilled human resources in the village office who can run open desa application, secondly, the limited village budget to fund technological infrastructure. Another problem is that there is community resistance to the use of technology in the village service system. This activity aims to help villages find solutions to existing problems, one of which is providing knowledge and skills on how digitalization can make village services and economic empowerment more efficient and improved. The PkM activity was attended by village officials hamlet heads and representatives of the community totaling 24 people. The method used is Community Base-Participatory Research (CBPR). The results of activity, in addition to the implementation of this PkM activity, there has also been a transfer of knowledge from the implementer to the participants of the socialization about Village Office Digitalization: Smart Solutions to Improve Services and Community Economic Empowerment.

Keywords: village; digitalization; open desa;economic empowerment; improving village services

Abstrak: Kegiatan PkM ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi aparat Desa Silo Bonto manfaat digitalisasi desa bagi peningkatan layanan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Desa Silo Bonto yang berpenduduk 6387 jiwa yang tersebar di 11 dusun. Mayoritas masyarakat Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan adalah petani perkebunan kelapa dan kelapa sawit. Kantor Desa Silo Bonto memiliki aplikasi desa, namun belum dimanfaatkan, permasalahan yang muncul adalah belum adanya SDM terampil di kantor desa yang mampu menjalankan aplikasi Open Desa, kedua terbatasnya anggaran desa untuk mendanai infratruktur teknlogi. Permasalahan lainnya adalah ada resisitensi masyarakat dalam penggunaan teknologi dalam sistem pelayanan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu desa dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada, ssalah satunya memberikan pengetahuan dan keterampilan bagaimana digitalisasi mampu mengefisienkan dan meningkatkan layanan dan pemberdayaan ekonomi desa. Kegiatan Pk Mini dihadiri oleh apparat desa dan kepala dusun serta perwakilan Masyarakat yang berjumlah 24 orang. Metode yang digunakan adalah Community Base-Partisipatory Research (CBPR). Hasil kegiatan, selain terlaksananya kegiatan PkM ini juga telah terjadi transfer ilmu dari pelaksana ke peserta sosialisasi tentang Digitalisasi Kantor Desa: Solusi Cerdas Meningkatkan Pelayanan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Kata kunci: desa; digitalisasi; open desa; pemberdayaan ekonomi; peningkatan layanan desa

ISSN 2614-7912 (Print) ISSN 2622-3813 (Online)

Available online at https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurdimas

PENDAHULUAN

Desa Silo Bonto memiliki luas 22.5625 km2 dengan jumlah penduduk 6387 jiwa dan jumlah kepa keluar 1895 KK dan terdiri dari 11 dusun (Kabupaten Asahan, 2023). Permasalahan yang dihadapi adalah layanan (1) kependudukan masih dilakukan secara konvensional face to face ke kepala dusun ataupun ke kantor desa (2) Desa telah memiliki website, namun belum dijalankan dapat karena beberapa kendala, (3) terbatasnya SDM terampil, (4) terbatasnya anggaran desa untuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak guna mendukung digitalisasi desa, serta adanya (5) resistensi masyarakat eggan merubah budaya konvensional dengan digitalisasi. Hal ini sejalan dengan hasil beberapa penelitian yang menyatakan bahwa salah satu tantangan dalam implementasi digitalisasi desa adalah SDM dan infrastruktur (Zulvia & Harahap, 2023). Oleh karenanya pemerintah telah mengantisipasi hal ini dengan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa harus mendapatkan desa informasi, termasuk juga fasilitas pendukungnya (Undang-Undang Republik Indonesia No 6, 2014)

Beberapa persoalan yang dapat diselesaikan dengan kegiatan PkM ini namun ada juga permasalahan yang belum bisa diselesaikan seperti anggaran dan masalah resitensi masyarakat . Digitalisasi layanan desa merupakan bagian kecil dari konsep smart village yang digadangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi dengan konsep smart village pembangunan desa dilakukan

dengan penerapan teknologi informasi yang tepat guna diharapkan desa dapat melakukan terobosan sehingga dapat memenuhi kategori desa yang mandiri (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2024)

Digitalisasi desa telah banyak dibahas dalam penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahoyo et al, yang menyatakan bahwa dampak langsung digitalisasi desa yaitu peningkatan pendapatan desa, membuka peluang pasar dan kesempatan kerja, sedangkan dampak tidak langsungnya adalah terjalinya networking atau desa dengan pihak luar kerjasama (Rahoyo et al., 2023). Digitalisasi desa juga membantu proses administrasi desa cepat lebih dan rapi pengelolaan dan pemeliharaanya lebih mudah, kemudian aplikasi digitalisasi layanan surat-menyurat mempermudah pengrusan surat menyurat di desa (Afifan, 2024) (Astawa et al., 2023) (Nurkholis et al., 2022). Kemudian penelitian yang berjudul Penerapan Administrasi Pemerintahan Berbasis Digitalisasi 4.0 menghasilkan menghasilkan akurasi Serta data penduduk yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan dibidang sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan masyarakat di Desa Dangkalan (Nursin et al., 2023).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan membahas tentang digitalisasi desa, yang menjadi inspirasi pelaksana PkM untuk melaksanaan kegiatan PkM di Desa Silo Bonto untuk pengembangan aplikasi open Tujuan dari kegitan PkM ini memberikan pengetahuan baru bagi desa tentang berbagai manfaat yang bisa diperoleh digitalisasi ini serta peningkatan dari pemahaman aparat desa dalam

ISSN 2614-7912 (Print) ISSN 2622-3813 (Online)

Available online at https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurdimas

mengoptomalkan aplikasi yang telah ada.

METODE



Gambar 1. Kerangka Pelaksanaan PkM

diatas Gambar merupakan kerangka pemikiran awal dilaksanakannya kegiatan PkM ini. berawal dari kondisi eksisting Desa Silo Bonto yang kemudian memunculkan ide dan gagasan untuk melaksanakan kegiatan workshop kepada perangkat Desa Silo Bonto guna memberikan gambaran utuh tentang pentingnya digitalisasi di ini untuk era saat memaksimalkan layanan kependudukan, membuka peluang kerjasama pasar bagi pengembangan peluang perekonomian Masyarakat. Langkahlangkah pelaksanaannya adalah:

Langkah pertama melakukan identifikasi masalah yang dihadapi Desa Silo Bonto, yaitu layanan kependudukan masih dilakukan secara manual, keterbatsan SDM terampil, keterbatasan anggaran untuk pengadaan perangkat keras dan lunak guna mendukung implementasi digitalisasi Kantor Desa,

adanya penolakan dari Masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan desa (resistensi masyarakat). Identifikasi dilakukan masalah dengan mengumpulkan berbagai informasi kondisi eksisting desa serta interview dengan aparat desa. Serta pembentukan tim pelaksana PkM. Langkah kedua adalah perencanaan, menentukan tema kegiatan dilaksanakan yang akan berdasarkan kondisi eksisting yang ada hasil identifikasi awal. Menentukan tujuan kegiatan, partisipasi mitra dan tim pelaksana serta menentukan metode dan materi yang akan disampaikan. metode pelaksanaan yaitu metode Community Base-Partisipatory Research (CBPR) pendekatan penelitian yaitu yang melibatkan kerjasama setara antara peneliti anggota dan komunitas sepanjang proses penelitian (Haryono et 2024). Langkah ketiga adalah Pengumpulan dan analisis data pada tahap ini dilakukan pemetaan terhadap berbagai data dan isnformasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi desa Langkah ke empat adalah pelaksanaan kegiatan. Setelah melewati beberapa tahap maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Langkah terakhir adalah pelaporan kegiatan. Mitra kegiatan PkM tim dosen ini tentunya adalah Desa Silo Bonto, Dimana kepala Desa Silo Bonto adalah bapak Rusli. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini adalah penyediaan tempat, waktu dan kegiatan peserta yang seluruhnya merupakan apparat Kantor Desa dan perwakilan kepala dusun serta Masyarakat. Evaluasi kegiatan dilakukan Bersama tim dosen secara internal dengan melihat dan mengidentifikasi berbagai kendala secara langsung pada tiap tahapan pelaksanaan PkM.

ISSN 2614-7912 (Print) ISSN 2622-3813 (Online)

Available online at https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurdimas



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PkM

PEMBAHASAN

Kegiatan PkM dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 yang bertempat di kantor Desa Silo Bonto di hadiri seluruh aparat desa termasuk 11 kepala dusun di lingkungan Desa Silo Bonto berjumlah 24 peserta. Kegiatan dibuka oleh bapak Kepala Desa Silo Bonto bapak Rusli. Pada sambutannya beliau mengingatkan pentingnya menjalin kerjasama desa dengan Universitas untuk kemajuan desa terutama dalam hal peningkatan skill dan pengetahuan aparat menjadi salah desa yang permasalahan, kurangnya SDM terampil di Desa Silo Bonto terutama yang siap mengelola dan mengunakan teknologi. Lebh lanjut bapak Kepala Desa, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi desa Silo Bonto selain SDM terampil juga ada ketidak inginan masyarakat melakuan perubahan dari m mkonvensional ke digitalisasi karena dianggap merepotkan.



Gambar 3. Paparan Materi

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi oleh tim pelaksana PkM. Salah satu materi yang ditampilkan adalah aplikasi Desa yang dijelaskan oleh bapak Herman Saputra, M.Kom Pada kesempatan diskusi, bapak kepala desa dan aparat desa lainnya mempertanyakan bagaimana melakukan pemberdayaan ekonomi desa mengingat desa Silo Bonto. mayoritas masyarakatnya adalah petani kelapa dan kelapa sawit.

Pada Sesi diskusi, peserta banyak bertanya tentang pengelolaan website desa, dampak digitalisasi tidak hanya bagi aparat desa tetapi lebih khususnya pemberdayaan lagi bagi ekonomi masyarakat. Bapak Kepala Desa, Bapak Rusli juga mempertanyakan bagaimana menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan universitas bagi kepentingan dan kemajuan Hambatan desa. didihadapi tim pada pelaksanaan PkM ini pertama pada tingkat kehadiram masyarakat yang rendah hanya diwakili beberapa orang dari sekolah, dan para kepala dusun yang mayoritas sudah berusia lanjut sehingga kurang antusias dengan teknologi. Namun kepala desa cukup antusias untuk mengadopsi aplikasi open desa.

Kegiatan kemudian diakhiri

dengan pemberian cenderamata kepada bapak Kepala Desa Silo Bonto Bapak

Rusli, dan juga foto bersama dengan seluruh peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tim dosen Universitas Royal



Gambar 4. Penyerahan Cenderamata Kepada Bapak Kepala Desa

SIMPULAN

Kegiatan PkM ini memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang manfaat dari digitalisasi desa khsusunya bagi peningkatan layanan desa juga bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Paparan tentang keberhasilan beberapa desa di Indonesia yang telah berhasil mengadopsi teknologi digital dalam peningkatan layanan desa mampu menggugah aparat desa untuk mengadopsi aplikasi open desa menjadi sarana layanan desa berbasis digital . tindak lanjut lainnya juga penjadwalan kegiatan pelatihan masyarakat untuk menggunakan layanan secara online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Royal Teladan Asahan yang telah mendanai kegiatan Pk Mini. Juga terima kasih kepada kepala Desa Silo Bonto serta leuruh apparat desa dan juga kepala dusun yang telah memfasilitasi kegiatan ini, melalui penyediaan tempat,Lokasi serta peserta yang mengikuti kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

Afifan, A. A. (2024). Digitalisasi Sistem Administrasi Desa Karanganyar Melalui Aplikasi Berbasis Web. *JITET (Jurnal Informatika Dan Teknil Elektro Terapan*, 12(1). https://doi.org/10.23960/jitet.v12i1. 3876

Astawa, I. N. G. A., Manuaba, I. B. P., Atmaja, I. M. A. D. S. A., & Sukarata, I. P. G. (2023). Aplikasi Digitalisasi Layanan Surat-Menyurat Untuk Meningkatan Layanan Administrasi Kantor Desa. *Jurnal Widya Laksana*, 12(2), 359–366.

https://doi.org/10.23887/jwl.v12i2.6 1871

Haryono, E., Ridwan, M., Murtaqi, A., Nur, A., Izzah, L., Septian, D., Al, I. A. I., Cepu, M., Al, I. A. I., Cepu, M., Khozinatul, I. A. I., Blora, U., Al, I. A. I., & Cepu, M. (2024). Metode-Metode Pelaksanaan PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Untuk Perguruan Tinggi. 5(2), 1–21.

Kabupaten Asahan, B. P. S. (2023). Kecamatan Silau Laut Dalam Angka 2023.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D. T. R. I. (2024). Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas. 5–27.

Nurkholis, A., Jupriyadi, J., Budiman, A.,

Pasha, D., Ahdan, S., Andika, R., & Amalia, Z. (2022). Digitalisasi Pelayanan Administrasi Surat Pada Desa Bandarsari. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(1), 21.

https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i1. 1493

Nursin, E., Septiana, G. L., Sahidi, C. S. R., & Aimang, H. A. (2023). Penerapan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Digitalisasi 4.0. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 47. https://doi.org/10.32529/tano.v6i1.2 296

Rahoyo, S., Slahanti, M., & Heriawan, B. (2023). Peran Digitalisasi Desa

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Krandegan, Jawa Tengah. *Kritis*, 32(1), 1–23. https://doi.org/10.24246/kritis.v32i1 p1-23

Undang-Undang Republik Indonesia No 6. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

https://doi.org/10.1145/2904081.290 4088

Zulvia, P., & Harahap, A. S. (2023).
Advokasi Digitalisasi Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa Cibodas Lembang Sebagai Desa Digital. RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 518–525. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1. 2501